

Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada

¹T. Ramadhan Hatim Sidik, ²Ali Yusri, ³Auradian Marta

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Korespondensi : Tengkuhatim23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komisi pemilihan umum Provinsi Riau dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pilgub Riau tahun 2018 dan faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih. Teori yang digunakan adalah teori menurut Chandler yang mengelompokkan ke dalam 3 kelompok yaitu Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang (Perencanaan), Pemilihan Tindakan (Pencapaian Visi dan Misi), Alokasi Sumber Daya (Dukungan Pelaksanaan Kegiatan). Lokasi penelitian ini di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Tahapan formulasi dan sasaran jangka panjang, tahapan ini ada kejelasan menunjukkan rencana yang sosialisasi ditetapkan oleh KPU, Tahapan pemilihan tindakan, tahapan ini KPU melaksanakan sosialisasi kepada segmen seluruh pemilih dengan metode sosialisasinya berupa yaitu tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan karakteristik dengan segmen yang dituju, Tahapan pengalokasian sumber daya, tahapan ini sudah menunjukkan dilaksanakannya peningkatan kegiatan sumber daya berupa bimbingan teknis seluruh kepada panitia ad hoc yang akan melakukan sosialisasi pemilu.

Kata kunci : strategi, partisipasi pemilih, pilkada.

Abstract

This study aims to analyze the Riau Provincial General Election Commission's strategy to increase voter participation in the 2018 Riau gubernatorial election and the factors influencing this increase. The theory used is Chandler's theory, which divides the election into three groups: Formulation and Long-Term Goals (Planning), Selection of Actions (Vision and Mission Achievement), and Resource Allocation (Support for Activity Implementation). The research location is in Riau Province. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interviews and document searches. The research findings include the formulation and long-term target stages, which clearly demonstrate the socialization plan established by the General Elections Commission (KPU). The action selection stage, in which the KPU conducts socialization to all voter segments, using methods such as face-to-face meetings and the use of mass media, with implementation patterns tailored to the characteristics of the target segment. The resource allocation stage, in which increased resource activities are implemented, including comprehensive technical guidance for the ad hoc committees that will conduct election socialization.

Keyword: strategy, voter participation, regional elections

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus perwujudan demokrasi. Demokrasi secara sederhana dapat dijelaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka sebuah pemilu merupakan hal penting di negara demokrasi. Pemilu sebagai proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, baik untuk memilih anggota Legislatif, maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden ataupun memilih Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Maka dari itu rakyat memilih sendiri kepengimpinannya

melalui pemilihan langsung baik di Legislatif dan Eksekutif. Tahun 2018 ini merupakan tahun politik dimana terdapat 171 daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah yakni salah satunya Provinsi Riau. (Kompas, 2025),

Hak pilih atau hak memilih adalah keputusan untuk memilih yang dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan para calon wakil rakyat yang baik dan sesuai yang diharapkan bersama. Oleh karenanya dalam memilih dan menggunakan hak pilihnya hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya untuk menjadikan pemerintahan yang lebih baik, bukan malah tidak memilih atau masuk kedalam golongan putih. Hal ini harus dihindari, karena bagaimanapun juga sikap tidak memilih berarti sama halnya dengan dia acuh terhadap masa depan bangsanya sendiri.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen (independent regulatory agencies) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 22E Konstitusi/UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa undang-undang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, maka diharuskan anggota KPU adalah non-partisan dan independen (Nanda, 2021)

Secara umum dapat digambarkan Strategi Komisi Pemilihan umum yakni sosialisasi, fungsionalisasi institusi pemerintahan secara proporsional, mampu membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dengan desk pemilu dan konsisten dalam pelaksanaan regulasi sehingga Komisi Pemilihan Umum dapat menempatkan dirinya secara netral, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Komisi Pemilihan Umum juga semakin menegaskan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat termasuk membangun kesadaran politik masyarakat. Masalah rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu masalah yang serius terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Riau seperti pada pemilihan Gubernur tahun 2013 dan tahun 2018.

Tabel 1 : Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013.

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%Suara
1	Herman dan Agus	546.741	23,00%
2	Anas dan Andi	658.291	28,83%
3	Lukman Edy dan Suryadi	333.621	14,04%
4	Achmad dan Masrul Kasmy	492.665	20,73%
5	Jon Erizal dan Mambang Mit	318.548	13,40%
Suara Sah		2.376.839	97%
Suara Tidak Sah		75.730	3%
Partisipasi Pemilih/Total Suara Sah		2.452.618	61,31%
Tidak Menggunakan Hak pilih/Golput		1.547.890	38,69%
Daftar pemilih tetap		4.000.459	100,00%

Sumber: KPU Provinsi Riau

Dari hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur Riau tahun 2013, dimenangkan oleh pasangan calon Anas dan Andi dengan perolehan suara 28,83%. Adapun dari tingkat partisipasi masyarakat yang memilih Gubernur ditahun 2013 ini adalah sebesar 61,31%. Jadi masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya masih ditinggi pada pilkada 2013 lalu, dan seharusnya Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Riau mencari cara untuk sebagaimana menekan angka Golput yang sudah terjadi di tahun 2013, dan mencari solusi yang tepat serta inovasi yang menarik sehingga masyarakat tidak lagi golput.

Maka dari itu kita bandingkan data pilkada pada tahun 2018 dibawah ini.

Tabel 2 : Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018.

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%Suara
1	Syamsuar dan Edy Nasution	799.289	38,2%
2	Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno	507.187	24,2%
3	Firdaus dan Rusli Effendi	416.248	19,9%
4	Muhammad Lukman Edy dan Hardianto	369.802	17,7%
	Suara Sah	2.092.526	97,5%
	Suara Tidak Sah	53.606	2,5%
	Partisipasi Pemilih/Total Suara Sah	2.146.132	58,0%
	Tidak Menggunakan Hak pilih/Golput	1.552.580	42,0%
	Daftar pemilih tetap	3.698.712	100,00%

Sumber: KPU Provinsi Riau

Jika dibandingkan dengan pilkada tahun 2013 ada penurunan tingkat partisipasi masyarakat dari 61,31% tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada 2013 menjadi 58% tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada 2018 serta suara tidak sah juga mencapai 53.606 suara. Oleh karena itu peneliti melihat ada beberapa hal yang harus diteliti mengenai strategi dari KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar ikut memilih pemimpinnya. Kemudian jika dilihat dari skala nasional pada pilkada serentak, peneliti menilai tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada serentak 2018 masih minim. Pada skala nasional, partisipasi masyarakat di Pilkada 2018 memang mencapai 72% dari jumlah total DPT. Akan tetapi, di 17 pilkada tingkat Provinsi partisipasi masyarakat hanya mencapai 69%.

“partisipasi terendah Pilkada 2018 itu di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 58%. Sementara yang tertinggi, dengan beberapa catatan, di Provinsi Papua mencapai 84%, jadi kalau target KPU RI 77% partisipasi, berarti hanya di Provinsi Papua yang melebihi target. Masih perlunya dorongan partisipasi masyarakat agar maksimal sampai titik paling minim jumlah yang tak gunakan hak pilih” ujar anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dikantornya, Jakarta, pada Kamis (12/7/2018) oleh tirto.id.

Jadi partisipasi masyarakat pemilih pada Pilkada serentak tahun 2018 yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau yaitu 58%. Oleh karena itu peneliti melihat ada beberapa permasalahan pada pelaksanaan Pilkada Riau tahun 2018 yang datang dari peran dan fungsi KPU atau lembaga bahkan masyarakat di Provinsi Riau. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian pada KPU Provinsi Riau sebagai penyelenggara Pilkada Riau tahun 2018, berikut tabel partisipasi politik di Provinsi Riau :

Tabel 3 : Daftar Pemilih Tetap dan Presentasi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

No	Kabupaten/Kota	Suara sah	Suara tidak sah	Total	DPT	Presentasi Partisipasi Pemilih
1	BENGKALIS	212,086	7,381	219,467	363,873	53,314%
2	INDRAGIRI	291,894	21,631	313,525	448,403	60,306%

	HILIR					
3	INDRAGIRI HULU	128,586	6,319	134,905	270,512	51,644%
4	KAMPAR	290,614	6,404	298,018	449,804	56,823%
5	KEPULAUAN MERANTI	80,074	3,004	83,078	135,461	56,564%
6	DUMAI	98,585	4,029	102,614	174,249	54,142%
7	PEKANBARU	308,756	6,890	315,646	497,880	62,166%
8	KUANTAN SINGINGI	138,261	3,285	141,546	214,156	57,234%
9	PELALAWAN	120,195	3,971	124,166	193,622	61,207%
10	ROKAN HILIR	321,504	4,627	326,131	372,645	59,059%
11	ROKAN HULU	245,128	3,674	246,802	310,627	58,945%
No	Kabupaten/Kota	Suara sah	Suara tidak sah	Total	DPT	Presentasi Partisipasi Pemilih
12	SIAK	143,156	4,515	147,671	267,380	60,451%
	JUMLAH	2,367,839	75,730	2,452,569	3,717,177	58,024%

Sumber : KPU Provinsi Riau

Dari data diatas dapat dilihat bahwa DPT terbanyak pertama berada di Provinsi Riau dengan 497,880 daftar pemilih tetap serta memiliki presentasi partisipasi pemilih 62,166% yang dimana Provinsi Riau memiliki presentasi partisipasi pemilih di urutan pertama juga, dan di urutan kedua ada Kabupaten Kampar dengan 449,804 daftar pemilih tetap serta presentasi partisipasi pemilih 56,823% yang berada di urutan kedelapan, dan di urutan ketiga ada Kabupaten Indragiri Hilir dengan 448,403 daftar pemilih tetap serta memilih partisipasi pemilih 60,306% yang berada di urutan keempat dari presentasi partisipasi pemilih, sementara daerah dengan daftar pemilih tetap terendah ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan daftar pemilih tetap 135,461 yang memiliki partisipasi pemilih 56,564% yang dimana Kepulauan Meranti berada di urutan ke sembilan sebagai daerah yang memiliki tingkat partisipasi di Provinsi Riau. maka dari itu kita harus melihat bagaimana 3 besar daftar pemilih tetap dalam partisipasi pemilihan kepala daerah Provinsi Riau serta daftar pemilih tetap terendah di daerah Provinsi Riau.

Perbandingan daerah yang memiliki daftar pemilih tetap yang sedikit lebih antusias dari pada daerah yang memiliki daftar pemilih tetap yang besar, dapat dilihat dari data di atas menunjukkan masih dapat diperhatikan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap daerah yang masih enggan dalam menggunakan hak suaranya tersebut, pada pemilihan kepala daerah tersebut pada tahun 2018 Provinsi Riau memiliki presentasi 58% dapat dilihat bahwa masih adanya 42% nya lagi adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut.

Dapat dilihat bahwa bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk mengurangi angka golput guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Provinsi Riau dalam menggunakan hak pilihnya yaitu dengan metode sosialisasi pemilu diantaranya yaitu melakukan publikasi melalui media masa, elektronik, dan media cetak. Dengan cara menyebarkan spanduk dan baliho hingga ketingkat Kelurahan, RRI dll. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau juga mensosialisasikan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dengan cara tatap muka yaitu melalui pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat seperti, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Umum, Kepolisian, TNI dan Media (dalam berbagai forum).

Strategi juga digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan (Sanjaya, 2008:126). Strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (David, 2006:5).

Disini strategi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menggunakan hak pilih melalui sosialisasi yang diberikan. Hal ini tentunya akan berdampak dengan berkurangnya jumlah masyarakat yang tidak memilih di Pemilu 2018 ini. Strategi untuk meningkatkan angka partisipasi yang diterapkan selama ini belum berdampak secara signifikan untuk menekan angka golput. Dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah golput dari periode ke periode selanjutnya di tingkat nasional dan pada pemilihan di tahun 2018. KPU Provinsi Riau dalam hal ini harus memberikan perhatian lebih agar beberapa alasan diatas tidak sampai terjadi sehingga tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat semakin baik dan minimal dapat mencapai target yang ditentukan oleh KPU Pusat yakni sebesar 77.5%.

Selain itu juga sasaran sosialisasi KPU Provinsi Riau meliputi komponen pemilih berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, masyarakat umum, media masa, bisa dilihat bahwa sasaran sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sangat banyak yang harus di sosialisasikan menjadi agenda rutinitas mereka ketika menjelang Pemilu, sasaran ini bisa kita lihat pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisas, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Disini lain Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Tugas-tugas tersebut secara hierarki dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga dalam lingkup kabupaten/kota maka tugas untuk membangun kesadaran politik masyarakat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi salah satunya seperti tugas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

2. METODE

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan type yang digunakan dalam peneliti ini adalah type deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan dengan data-data yang ada dengan masalah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Provinsi Riau Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Digunakannya metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek, suatu set kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian ini berarti objek dan tujuannya sudah ditetapkan sehingga mempermudah bagi penulis dalam melakukan penelitian penulis. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam Pemerintahan. Untuk memperolehnya data primer, lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Riau.

Yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka penetapan situs penelitian ini adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang beralamat di jalan Gajah Mada Nomor 200, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli. Menurut Spradley (Moleong, 2004: 165) informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan teknik key person. Teknik memperoleh informan penelitian seperti itu digunakan karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan key person untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. Key person ini adalah tokoh formal maupun tokoh informal. (Bungin, 2007: 77). Untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dipilih karena informan yang diambil memiliki tokoh tertentu, pemilihan informan berdasarkan penelitian.

Tabel 4: Key Informan dan Infoman dalam Penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Provinsi Riau

No	Nama	Jabatan	Key Informan	Informan	Ket
1	Ilham Muhammad Yasir, S.H, LLM	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	1		-
2	Nugroho Noto Susanto, S.IP	Anggota KPU Provinsi Riau (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM)		1	-
4	Masyarakat Umum	Tokoh Masyarakat, RT, RW. Mahasiswa		20	Masyarakat Provinsi Riau

Key Informan yang digunakan penulis ialah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Informan Utama dalam penelitian ialah Nugroho Noto Susanto selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan Informasi. Informan Tambahan dalam penelitian ini ialah Masyarakat Provinsi Riau. Alasan peneliti mengambil Ketua KPU Dan Nugroho Noto Susanto selaku Anggota Komisi Pemimlhan Umum Provinsi Riau Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan Informasi Komisi Pemimlhan Umum Provinsi Riau sebagai informan karena mereka merupakan stakholder (pemangku kepentingan) berperan terhadap Sosialisasi. Serta

Panitia Penyelenggara Pemilu sebagai penyelenggara dan Masyarakat Provinsi Riau yang berperan sebagai pemilih.

Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan Informasi yang baik, keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi, atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur -literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di kontribusikan makna dalam tertentu.
2. Dokumentasi menurut Sugiyono (2010:82) adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Sedangkan menurut Gubs dan Lincoln (dalam Moleong 2007:216) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen, sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugianto 2017). Menurut Bogda dan Biklen (Anggito and Setiawan 2018) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensisteksiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Data yang diperoleh sifatnya sangat luas dan kaya dengan berbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode atau kategori dari data tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Provinsi Riau)

Pembahasan ini menguraikan hasil penelitian mengenai strategi KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur Riau Tahun 2018. Penelitian berfokus pada

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, di mana ibu kota provinsi menempati urutan ketiga terendah di Provinsi Riau. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir, S.H., LLM., serta Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Nugroho Noto Susanto, S.IP., yang dinilai sebagai narasumber paling mengetahui strategi peningkatan partisipasi pemilih. Penelitian menekankan bahwa peningkatan partisipasi membutuhkan formulasi strategi dan sasaran jangka panjang yang tepat, tahapan sosialisasi yang efektif, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat. Hasil wawancara menjadi data primer dalam penelitian ini, sedangkan dokumentasi dari KPU dan masyarakat berfungsi sebagai data sekunder. Fokus wawancara diarahkan pada tiga indikator utama strategi KPU, yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2018.

Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 telah dilaksanakan melalui berbagai program sosialisasi, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau periode 2014–2019, Ilham Muhammad Yasir, serta Anggota KPU Nugroho Noto Susanto, diketahui bahwa KPU telah merumuskan formulasi strategi jangka panjang, termasuk penyuluhan tatap muka, pemanfaatan media sosial, pemberdayaan tokoh masyarakat, serta program KPU Goes to School dan Goes to Campus. Semua langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman pemilih mengenai tahapan pemilu dan pentingnya penggunaan hak pilih.

Namun, pelaksanaan sosialisasi menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan jangkauan kegiatan, kurang optimalnya penggunaan media digital, serta belum terbentuknya relawan demokrasi akibat keterbatasan anggaran. Akibatnya, beberapa wilayah seperti Bengkalis, Pelalawan, dan sebagian daerah lainnya tidak tersentuh kegiatan sosialisasi KPU. Temuan dari masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar memperoleh informasi pemilu melalui media sosial, televisi, atau grup WhatsApp, bukan melalui sosialisasi langsung KPU. Hal ini berdampak pada masih rendahnya kesadaran politik dan tingginya angka golput di beberapa wilayah.

Meskipun terdapat masyarakat yang merasakan dampak positif dari program sosialisasi seperti seminar, simulasi pencoblosan, dan kegiatan kolaboratif KPU Kabupaten, namun ketidakmerataan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi strategi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa formulasi strategi KPU telah berjalan, tetapi implementasinya belum optimal dan belum mencapai target cakupan wilayah secara menyeluruh. Oleh karena itu, KPU Provinsi Riau perlu merancang strategi yang lebih efektif, memperluas jangkauan sosialisasi, serta membentuk relawan demokrasi pada pemilu berikutnya agar partisipasi pemilih dapat meningkat dan kualitas demokrasi di Provinsi Riau semakin baik.

Pemilihan Tindakan

Pemilihan tindakan merupakan sebuah keputusan yang akan diambil, keputusan adalah suatu proses yang terus menerus (*continue*), sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada tindakan lebih lanjut maka keputusan itu tidak mempunyai arti. Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk (Dalam Dwi 2019: 6) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut. Dengan

pemilihan tindakan ini diharapkan KPU dapat lebih meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Riau Bapak Ilham Muhammad Yasir, S.H, LLM yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 September 2025 pada pukul 08.00 WIB, apakah sebelum melaksanakan sosialisasi KPU Provinsi Riau sudah melakukan penetapan jadwal sosialisasi kepada masyarakat umum, bapak Ilham Muhammad Yasir, S.H, LLM mengatakan bahwa :

“Tentu saja. Dalam melaksanakan setiap kegiatan, apalagi yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum, KPU harus bekerja berdasarkan jadwal tahapan yang sudah ditetapkan secara resmi. Penetapan jadwal sosialisasi ini merupakan bagian integral dari kepatuhan kita pada peraturan perundang-undangan., sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah divisi wajib dalam struktur KPU, dan kegiatannya dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelng di hari H. Namun, fokus dan intensitas sosialisasi wajib disesuaikan dengan tahapan pilkada yang sedang berjalan, dan itu semua merujuk pada jadwal resmi yang sudah kita tetapkan melalui rapat pleno.”

Penelitian kemudian menanyakan bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilu kepada masyarakat umum, bapak Ilham Muhammad Yasir, S.H, LLM mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan sosialisasi pemilu pada tahun 2018 kami lakukan dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup dua strategi utama: sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung (melalui media). Ini adalah respon kami untuk memastikan informasi pilkada menjangkau seluruh lapisan masyarakat Riau yang sangat beragam dan tersebar, meskipun dalam pelaksanaan kami menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, seluruh strategi sosialisasi ini berhasil meningkatkan partisipasi pemilih pilkada Riau 2018 dibandingkan sebelumnya, walaupun sepenuhnya belum mencapai target nasional yang diharapkan KPU RI”

Dikesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM dengan mengajukan pertanyaan yang sama pula. Nugroho Noto Susanto, S.IP mengatakan bahwa:

“sosialisasi langsung atau bertatap muka sudah kami lakukan melalui program KPU Goes to School dan KPU Goes to Campus untuk menjangkau pelajar SMA/SMK dan mahasiswa yang baru memiliki hak pilihnya, kami juga mengadakan sosialisasi ke perempuan dan kelompok marjinal yang merupakan diskusi khusus dengan perempuan, tokoh adat, dan komunitas minoritas, seperti yang pernah kami lakukan untuk masyarakat suku duono, untuk memastikan mereka terdaftar dan paham tahapan pilkada, dan kami juga melakukan sosialisasi tidak langsung yang menggunakan media, kami memanfaatkan seluruh kanal media, baik televisi, radio, maupun surat kabar lokal seperti Riau Pos dan Tribun, untuk menyiarkan informasi tahapan, profil calon, dan pesan-pesan ajakan untuk menggunakan hak pilihnya”

Selain itu, Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Masyarakat Pekanbaru Bapak Dr. Ikhsan pada Hari Rabu Tanggal 02 September 2025. Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilu kepada. Bapak Dr. Ikhsan mengatakan bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan cukup masif, terutama melalui media baliho, spanduk di jalan-jalan utama, dan iklan di media sosial. Saya melihat pihak penyelenggara sudah berupaya menjangkau masyarakat dengan berbagai platform. Namun, bagi masyarakat umum yang mungkin tidak terlalu aktif di media sosial atau sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, informasi yang mereka dapatkan seringkali hanya sebatas visual permukaan, seperti nama calon atau ajakan untuk memilih, tanpa detail yang cukup mendalam mengenai program kerja atau visi misi para kandidat”

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Masyarakat Pekanbaru Ibu Rini Handayani pada Hari Rabu Tanggal 02 September 2025. Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilu kepada. Ibu Rini Handayani mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan sosialisasi pemilukada ini menurut saya sudah cukup modern dan gencar, terutama di media media yang saya akses sehari hari. Saya melihat banyak iklan digital dan konten di media sosial seperti instagram atau tiktok yang dibuat oleh KPU atau tim relawan pemilih. Ini bagus, terutama untuk menjangkau pemilih muda, namun meskipun gencar di media sosial, terkadang sosialisasi yang sampai ke kami terlalu fokus pada figur calon saja bukan pada tahapan pemilukada atau cara kita menyaring informasi yang benar. Misalnya, kapan jadwal debat resmi, atau bagaimana cara melaporkan pelanggaran”

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Aziz salah seorang masyarakat Kabupaten Pelalawan yang dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 11 September 2025. Peneliti menanyakan apakah sosialisasi pendidikan partisipasi pemilih mudah dimengerti, Bapak Ahmad Aziz mengatakan bahwa :

“saya tidak mendapatkan informasi sosialisasi pendidikan pemilih secara langsung. Kalau yang berupa baliho atau spanduk di jalan besar memang ada, tapi itukan hanya sekilas saja. Informasi yang menjelaskan secara rinci tentang tata cara pencoblosan yang benar, pentingnya hak suara, apalagi tentang visi misi calon yang akan dipilih, itu yang tidak sampai ke saya,”

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Septi Rahmayudi salah seorang masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 14 September 2025. Peneliti menanyakan apakah sosialisasi pendidikan partisipasi pemilih mudah dimengerti, Bapak Septi Rahmayudi mengatakan bahwa :

“sosialisasinya mudah dimengerti, sosialisasi yang paling banyak kami lihat itu memang melalui media luar ruang, seperti spanduk dan baliho, dan itu cukup jelas dalam hal mengajak masyarakat untuk datang memilih pada hari pencoblosan, mengenai informasi dasar sudah ada, tetapi untuk membuat masyarakat benar benar cerdas dan mengerti mengapa mereka harus memilih dan bagaimana prosesnya.”

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Faisal Fahmi salah seorang masyarakat Kabupaten Bengkalis yang dilakukan pada Hari Senin Tanggal 08 September 2025. Peneliti menanyakan apakah sosialisasi pendidikan partisipasi pemilih mudah dimengerti, Bapak Faisal Fahmi mengatakan bahwa :

“Untuk sosialisasi yang dilakukan materinya cukup mudah dimengerti karena memakai bahasa yang lebih santai dan langsung pada intinya. Mereka fokus pada tanggal pemilihan dan ajakan untuk menggunakan hak pilih, namun yang menjadi masalah adalah detail teknisnya, saat kami mendapatkan materi dari petugas ditingkat bawah (PPS atau PPK) mengenai tata cara pencoblosan, penggunaan surat suara, atau bagaimana menghindari suara tidak sah, ini terkadang rumit. Penyampaiannya terkesan terburu buru, perlu ada contoh visual atau simulasi yang sederhana.”

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rudianto, S.Ag salah seorang masyarakat Kabupaten Bengkalis yang dilakukan pada Hari Senin Tanggal 08 September 2025. Peneliti menanyakan apakah sosialisasi pendidikan partisipasi pemilih mudah dimengerti, Bapak Rudianto, S.Ag mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya mengenai sosialisasi mudah dimengerti, menurut saya sosialisasi ajakan untuk memilih itu sangat mudah dimengerti mengapa? Bisa kita lihat dimana mana ada baliho, ada himbauan di media, pesannya sangat jelas (ayo memilih dan jangan golput). Namun, yang sering kurang sampai dan kurang mendalam adalah pendidikan substansi partisipasi pemilih. Ini bukan sekedar ajakan, tetapi bagaimana masyarakat diajarkan memilih dengan etika, rasional, dan bertanggung jawab. Contohnya, penjelasan mengenai larangan politik uang atau pentingnya mengecek latar belakang moral dan integritas calon. Materi materi yang berkaitan dengan nilai nilai ini, yang sebenarnya sangat penting agar pemilukada berintegritas. Saya berpendapat, sosialisasi harus lebih banyak menyentuh aspek pendidikan moral dan hukum pemilihan, bukan hanya teknis pencoblosan. Metode penyampaiannya juga harus disesuaikan, misalnya dengan melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat, sehingga pesannya lebih menyentuh hati dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.”

Berdasarkan temuan dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa KPU Provinsi Riau telah memberikan penjelasan yang jelas dalam memilih tindakan. Namun, ada sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau. Hal ini menjadi alasan mengapa tingkat antusiasme masyarakat dalam pemilu masih rendah. Akibatnya, angka partisipasi di Provinsi Riau mengalami penurunan. Oleh karena itu, KPU perlu lebih berusaha untuk memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat, karena tidak menggunakan hak suara sama saja dengan membuang anggaran yang sia-sia.

KPU Provinsi Riau telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, dimana mereka lebih memfokuskan upaya tersebut pada segmen keluarga yang dianggap strategis serta masyarakat umum. Berdasarkan hal ini, peneliti menyarankan agar KPU Provinsi Riau memperluas jangkauan sosialisasinya ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya tidak berpartisipasi dalam pemilu dapat terdorong untuk ikut memilih setelah mendapatkan sosialisasi. Upaya sosialisasi ini juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas partisipasi pemilih di Provinsi Riau.

Alokasi Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya dalam alokasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu, terutama melalui pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) secara berjenjang. Ketua KPU Provinsi Riau 2014–2019, Ilham Muhammad Yasir, S.H., LL.M, menegaskan bahwa pembinaan dilakukan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, kemudian diteruskan kepada PPK dan PPS. Ia menyatakan bahwa: *“KPU Provinsi menyusun materi, memastikan standarisasi, dan melatih KPU Kabupaten/Kota, lalu KPU Kabupaten/Kota-lah yang melaksanakan bimtek kepada PPK dan PPS”*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nugroho Noto Susanto, S.IP, yang menyoroti pentingnya pemahaman regulasi terbaru, akurasi data pemilih, serta integritas penyelenggara. Ia menjelaskan bahwa materi bimtek menekankan *“pemahaman peraturan PKPU terbaru, pemuktahiran data pemilih, serta penanaman nilai-nilai netralitas dan integritas”*.

Dari perspektif masyarakat, hasil wawancara menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa warga menilai penyelenggara sudah kompeten dan netral, seperti yang disampaikan Bapak Syafrial Alidin S.Ag: *“menurut saya sudah memenuhi syarat tersebut, karena diwaktu pemilihan suasana begitu kondusif, serta penyelenggara bersifat netral.”* Namun, terdapat juga kritik dari sebagian masyarakat, terutama terkait tekanan politik dan kurangnya kompetensi teknis di lapangan. Bapak Budi Rahmadi S.Pd menyampaikan bahwa: *“para penyelenggara tidak netral, akibat tekanan dari pejabat lokal.”* Temuan lain berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu, di mana masih terdapat kebingungan penyelenggara terkait pemilih ber-E-KTP yang tidak terdaftar dalam DPT. Menurut Bapak Bambang: *“banyak aduan dari masyarakat bahwa yang tidak terdata maka tidak bisa mencoblos... apakah tidak adanya solusi dari pihak KPU?”*

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU telah berupaya optimal dalam melakukan alokasi sumber daya, terutama melalui peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu. Namun, implementasi di lapangan masih belum merata. Sebagian daerah sudah merasakan manfaat sosialisasi, sementara daerah lain belum tersentuh. Kondisi ini berpotensi menurunkan partisipasi pemilih dan menghambat penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan strategi alokasi sumber daya, peningkatan pemerataan sosialisasi, serta optimalisasi peran relawan demokrasi menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan agar kualitas penyelenggaraan pemilu di Provinsi Riau dapat lebih baik dan merata.

Hambatan-hambatan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Riau Tahun 2018 (Studi Kasus di Provinsi Riau)

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut dapat tidak terlaksanan dengan baik, dengan begitu sangat akan berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. KPU Provinsi Riau upaya dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilukada Tahun 2018 mendapatkan beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan strategi. hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat umum menjadi salah satu kendala penting yang dihadapi. Tahapan ini memiliki peran strategis karena melalui proses inilah KPU Provinsi Riau dapat merumuskan langkah-langkah serta menentukan pola pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, KPU menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran sosialisasi yang disediakan pemerintah, yang belum sebanding dengan jumlah penduduk dan luasnya wilayah Provinsi Riau. Akibatnya, pada tahap perumusan program sosialisasi, KPU belum mampu mencakup seluruh rencana kegiatan secara menyeluruh dan hanya dapat memilih beberapa tindakan prioritas yang dianggap paling penting. Oleh karena itu, kesiapan dan dukungan finansial dari pemerintah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan guna mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi pemilukada di masa mendatang.
2. Kurangnya respons masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi menjadi salah satu kendala yang dihadapi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pada Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2018. Strategi yang diterapkan oleh KPU melalui pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal karena minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Rendahnya tingkat keikutsertaan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Provinsi Riau terhadap pentingnya pelaksanaan pemilukada masih belum merata. Oleh sebab itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilukada.
3. Keterbatasan sumber daya memiliki peran krusial dalam keberhasilan suatu kegiatan. KPU Provinsi Riau pada Pemilukada 2018, alokasi sumber daya untuk meningkatkan partisipasi pemilih terhambat secara signifikan karena ketidakcukupan sumber daya. Hambatan utamanya adalah kesenjangan antara luasnya wilayah dan besarnya populasi di Provinsi Riau dengan jumlah personel KPU yang terbatas. Akibatnya, upaya sosialisasi KPU tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Riau, yang pada akhirnya dapat memengaruhi capaian kinerja mereka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan dengan judul yaitu “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Riau 2018” maka pada bab ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Tahapan formulasi dan sasaran jangka panjang, tahapan ini ada kejelasan menunjukan rencana yang sosialisasi ditetapkan oleh KPU.
2. Tahapan pemilihan tindakan, tahapan ini KPU melaksanakan sosialisasi kepada segmen seluruh pemilih dengan metode sosialisasinya berupa yaitu tatap muka serta penggunaan media massa dengan

pola pelaksanaannya disesuaikan karakteristik dengan segmen yang dituju.

3. Tahapan pengalokasian sumber daya, tahapan ini sudah menunjukkan dilaksanakannya peningkatan kegiatan sumber daya berupa bimbingan teknis seluruh kepada panitia ad yang hoc akan melakukan sosialisasi pemilukada.

Kendala dalam menjalankan strategi KPU Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya dukungan finansial sosialisasi untuk yaitu anggaran berupa sosialisasi disediakan yang pemerintah seimbang belum dengan penduduk jumlah dan luas wilayah Provinsi Riau, tidak terbentuknya demokrasi relawan untuk KPU membantu dalam sosialisasi pelaksanaan kemasyarakatan.
2. Kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan dari sosialisasi KPU.
3. Keterbatasan Sumber daya manusia yaitu jumlah KPU personil yang masih terbatas untuk menjangkau masyarakat keseluruhan di Provinsi Riau.

5. SARAN

1. KPU Provinsi Riau perlu lebih memperhatikan serta mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan pemilu. Selain itu, KPU juga diharapkan dapat mempersiapkan kegiatan sosialisasi dengan lebih matang, baik dari segi kelengkapan materi maupun pengaturan waktu, agar seluruh pertanyaan dan keluhan masyarakat dapat dijelaskan dengan jelas. Pembentukan relawan demokrasi juga menjadi langkah penting untuk membantu KPU dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih secara signifikan.
2. Untuk penyelenggara pemilu harus juga lebih tanggap dalam pelaksanaan pemilu jika ada diantara masyarakat bertanya atau ada kendala yang terjadi dilapangan.
3. Untuk masyarakat seharusnya meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah atau calon yang akan dipilih dan harus meningkatkan pengetahuan dibidang media sosial atau media lainnya sehingga sosialisasi yang dilakukan KPU melalui media juga bisa di ketahui oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Manik, Kamil Husni dkk. 2014. *Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014*. Jakarta.
- [2]. Moleong, J, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- [3]. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [4]. Supriyono, Arif. 2014. *Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Jakarta Selatan. Perludem.
- [5]. Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Cet.5*. Jakarta.
- [6]. Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- [7]. David, Fred R. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- [8]. Ruliana, Poppy, 2016, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Rajawali pers
- [9]. Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- [10]. Andriani, F., & Putra, R. D. (2019). *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan.

- [11].Ardana, I. W., & Swandana, N. K. (2018). *Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar*. Jurnal Komunikasi Politik Nusantara.
- [12].Dharmawan, B., & Lestari, R. (2017). *Peran KPU dalam mensosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015*. Jurnal Demokrasi dan Pemilu.
- [13].Haryanto, T., & Wijayanti, S. (2016). *Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun 2015*. Jurnal Partisipasi Politik Indonesia.
- [14].Ismail, R., & Prasetyo, A. B. (2017). *Analisis kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam sosialisasi menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015*. Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan.
- [15].Mahyuddin, A., & Rahmawati, I. (2020). *Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dalam meningkatkan komunikasi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2019*. Jurnal Komunikasi Politik Lokal.
- [16].Nugraha, S., & Mulyani, P. (2018). *Strategi sosialisasi politik oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk membentuk pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 di Kabupaten Ngawi*. Jurnal Pendidikan Politik.
- [17].Pratama, Y., & Suryani, T. (2016). *Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Malang*. Jurnal Politik dan Kebijakan Publik.
- [18].Siregar, M., & Yuliana, D. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam Pilwako tahun 2017*. Jurnal Analisis Kebijakan Publik.